

Peranan Terpaan Media Sosial (*Instagram dan TikTok*) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang

Nanda Aurellia Putri, Drs AUFARUL MAROM, M.Si

**Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. Soedarto, S.H, Tembalang, Kota Semarang, Kota Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explore the role of social media, especially Instagram and TikTok, in implementing public information disclosure policies in Semarang City, with a focus on Generation Z as the main users and the Semarang City Diskominfo as policy actors. The background to this research includes the development of information technology and the increasing use of social media in Indonesia, which will reach 167 million users in January 2023, with Generation Z as the most active group, thereby potentially increasing the accessibility of public information disclosure policies. The aim of this research is to understand the role of social media exposure in Generation Z regarding information disclosure and the factors that influence the role of social media exposure of the Semarang City Government. The method used is a qualitative approach through in-depth interviews with informants from Generation Z and the Semarang City Diskominfo. The research results show that Generation Z has a high awareness of the importance of information disclosure. However, there are challenges in digital literacy, inaccurate information on social media, and their low desire to participate in public discussions. Findings also indicate negative interactions between the younger generation and the government, which is caused by the government's low response and negative perceptions of the credibility of information on social media. The conclusion of this research confirms that social media, namely Instagram and TikTok, have significant potential in increasing public information openness and community participation. Therefore, further efforts are needed from the government to increase Generation Z's interaction and trust in information conveyed via social media, as well as educational programs to increase digital literacy among young users.

Keywords: Public Information Openness, Policy Implementation, Social Media, Media Exposure, Generation Z.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan terpaan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang, dengan fokus pada Generasi Z sebagai pengguna utama dan Diskominfo Kota Semarang sebagai pelaku kebijakan. Latar belakang penelitian ini mencakup perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, yang mencapai 167 juta pengguna pada Januari 2023, dengan Generasi Z sebagai kelompok paling aktif, sehingga berpotensi meningkatkan aksesibilitas kebijakan keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peranan terpaan media sosial pada Generasi Z mengenai keterbukaan informasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan terpaan media sosial Pemerintah Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan dari Generasi Z dan Diskominfo Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keterbukaan informasi. Namun, terdapat tantangan dalam literasi digital, ketidakakuratan informasi di media sosial, serta rendahnya keinginan mereka untuk mengikuti diskusi publik. Temuan juga mengindikasikan kesenjangan interaksi antara generasi muda dan pemerintah, disebabkan oleh kurangnya respons pemerintah serta persepsi negatif terhadap kredibilitas informasi di media sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa media sosial, yakni Instagram dan TikTok, memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan interaksi dan kepercayaan Generasi Z terhadap informasi yang disampaikan melalui media sosial, serta program edukasi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pengguna muda.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan, Media Sosial, Terpaan Media, Generasi Z.

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, media sosial telah menjadi salah satu alat utama dalam penyebaran informasi. Platform seperti Instagram dan TikTok menawarkan cara baru untuk berinteraksi dan berbagi informasi, sehingga mempercepat penyebaran informasi ke berbagai kalangan, termasuk Generasi Z. Generasi Z,

yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, adalah kelompok yang sangat melek teknologi dan cenderung mengandalkan media sosial untuk mencari informasi. Mereka menunjukkan preferensi yang kuat untuk menggunakan platform-platform ini dibandingkan dengan sumber informasi tradisional, seperti surat kabar atau televisi. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam menjangkau dan melibatkan generasi muda dalam proses pembuatan kebijakan.

Tabel Survei 2024 Media Sosial di Indonesia

Aplikasi	Gen Z (Kelahiran >2013/Kurang dari 12 th)	Milenial (Kelahiran 1981-1996)	Gen x (Kelahiran 1965-1980)	Baby boomers (Kelahiran 1946-1964)
Facebook	51,64%	74,09%	66,30%	56,59%
Instagram	51,90%	22,14%	12,91%	12,79%
Youtube	38,63%	53,42%	62,91%	61,63%
TikTok	46,84%	31,72%	23,66%	13,57%
X	1,98%	0,77%	0,39%	0,00%
LinkedIn	0,08%	0,03%	0,00%	0,00%
?	0,67%	1,94%	5,15%	12,79%
dll	1,22%	1,70%	2,61%	1,94%

Sumber: APJII 2024

Berdasarkan data dari APJII 2024, Generasi Z (lahir setelah 2013) mendominasi pengguna internet di Indonesia dengan penetrasi mencapai 87,02% dan kontribusi 34,40% terhadap total pengguna. Mereka tertinggi dalam penggunaan media sosial, dengan 51,90% di Instagram dan 46,84% di TikTok. Milenial (lahir 1981-1996) juga aktif di Instagram (74,09%), tetapi tidak seaktif Generasi Z di TikTok. Keterlibatan Generasi X (1965-1980) dan Baby Boomers (1946-1964) jauh lebih rendah, dengan Baby Boomers mencatat angka

terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna terbanyak, tetapi juga memainkan peran penting dalam perubahan pola komunikasi dan konsumsi konten digital di masyarakat.

Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, telah berupaya memanfaatkan media sosial untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Melalui akun resmi di Instagram dan TikTok, Pemerintah Kota Semarang menyampaikan berbagai kebijakan, program, dan layanan publik dengan cara yang lebih interaktif dan menarik bagi generasi muda. Namun, meskipun terdapat upaya tersebut, efektivitas penggunaan media sosial dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi Generasi Z terhadap informasi publik tetap menjadi pertanyaan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan terpaan media sosial dalam membentuk sikap, pemahaman, dan keterlibatan Generasi Z dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.

Penelitian ini akan mengidentifikasi pola penggunaan media sosial oleh Generasi Z, terutama dalam mengakses informasi melalui Instagram dan TikTok. Fokusnya meliputi frekuensi, jenis konten yang diakses, dan interaksi dengan konten. Tujuannya adalah menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk menyampaikan

informasi publik yang relevan bagi generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor dari Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik perlu diperhatikan. Meskipun Generasi Z adalah digital natives, banyak dari mereka yang masih memiliki keterampilan literasi digital yang rendah, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Indeks Literasi Digital Indonesia menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di kalangan Generasi Z masih tergolong rendah, khususnya dalam memilah informasi yang benar dan kredibel.

Selain itu, persepsi negatif terhadap media sosial sebagai sumber informasi resmi juga menjadi masalah signifikan. Banyak anggota Generasi Z yang menganggap informasi yang disampaikan melalui media sosial kurang kredibel, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam diskusi publik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% informasi yang beredar di media sosial mengenai kebijakan publik

mengandung unsur misleading atau tidak akurat. Angka ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Generasi Z dalam menghadapi banjir informasi yang mereka terima setiap hari. Ketidakakuratan informasi ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, sehingga mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga pemerintah dan proses kebijakan publik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peranan terpaan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, pada Generasi Z dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang. Penelitian ini mengumpulkan data secara deskriptif, yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian mendetail tentang dinamika serta dampak penggunaan media sosial di kalangan Generasi Z. Lokus penelitian ini terletak di Kota Semarang, yang merupakan daerah dengan populasi pengguna media sosial yang tinggi, terutama di kalangan Generasi Z. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana Generasi Z menggunakan media sosial untuk mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan karakteristik tertentu, memastikan informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. Proses pemilihan responden mencakup berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Saluran Komunikasi Publik serta anggota masyarakat Generasi Z di Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder mencakup dokumentasi dan literatur yang relevan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, teknik triangulasi digunakan, yaitu menggabungkan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini pada dasarnya melakukan analisis mengenai peranan terpaan media sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk pada bagaimana Generasi Z menggunakan

media sosial untuk mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur terkait serta informasi yang diperoleh dari informan yang terlibat dalam topik penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat dan pernyataan informasi yang disampaikan oleh para informan selama sesi wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang ahli dan memiliki pengetahuan mendalam terkait dengan topik yang diteliti, seperti anggota komunitas, pengurus program, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menuangkan informasi dalam bentuk penelitian kualitatif yang menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengungkapkan data faktual, tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas mengenai tantangan dan keberhasilan peranan media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, wawancara langsung digunakan sebagai sumber data utama, yang kemudian didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peranan terpaan media sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z

dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang

Berdasarkan Teori Terpaan media menurut Rosengren (dalam Rizki & Pangestuti, 2017) Peranan terpaan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang merupakan aspek krusial yang tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan partisipasi aktif Generasi Z. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah dalam menciptakan konten yang menarik dan informatif menjadi sangat penting, karena dapat mendorong interaksi yang positif antara masyarakat dan kebijakan publik. Selain itu, kepercayaan terhadap media sosial sebagai sumber informasi yang kredibel juga menjadi perhatian utama, mengingat tantangan dalam memilah informasi yang akurat di tengah banjir berita palsu. Dengan mengintegrasikan ketiga komponen ini—keterlibatan pemerintah, kepercayaan masyarakat, dan kualitas informasi—kita dapat membangun

platform yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sekaligus memenuhi kebutuhan informasi Generasi Z di Kota Semarang

a. Keterlibatan dan Partisipasi Aktif Generasi Z dengan Konten yang diposting

Keterlibatan Generasi Z dengan konten yang diposting oleh akun resmi pemerintah kota Semarang di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok mencerminkan dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, dikenal sebagai generasi digital natives yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan media sosial sebagai sumber informasi, hiburan, dan interaksi sosial.

Secara umum, tingkat keterlibatan Generasi Z dengan konten yang diposting oleh akun resmi Pemerintah Kota Semarang di Instagram dan TikTok masih tergolong moderat. Keterlibatan ini diukur dari jumlah likes, komentar, shares, dan saves pada setiap konten. Meskipun banyak anggota Generasi Z yang mengikuti akun-akun tersebut, tidak semuanya aktif berinteraksi dengan konten yang dipublikasikan. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan ini antara

lain adalah relevansi konten dengan minat mereka, kualitas visual konten, gaya bahasa yang digunakan, serta responsivitas pemerintah terhadap komentar dan pertanyaan yang diajukan. Konten yang dianggap menarik dan relevan, seperti informasi tentang acara-acara lokal, tips kesehatan, atau isu-isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan, cenderung mendapatkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, konten yang dianggap terlalu formal, membosankan, atau kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka cenderung diabaikan. Selain itu, penggunaan visual yang menarik, seperti foto dan video berkualitas tinggi, serta gaya bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan gaya komunikasi Generasi Z juga dapat meningkatkan tingkat keterlibatan mereka. Responsivitas pemerintah terhadap komentar dan pertanyaan yang diajukan juga sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif. Jika pemerintah cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, atau menanggapi masukan dari masyarakat, Generasi Z akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, jika pemerintah cenderung mengabaikan komentar atau pertanyaan yang diajukan, Generasi Z akan merasa kecewa dan enggan untuk berinteraksi lebih

lanjut. Berdasarkan hasil observasi, konten video pendek di TikTok cenderung lebih banyak menjangkau generasi Z dibandingkan konten di Instagram.

b. Kejelasan dan Keterpahaman melalui Media Sosial (Instagram dan TikTok) terkait Keterbukaan Informasi Publik

Kejelasan dan keterpahaman informasi menjadi faktor krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, terutama dalam menjangkau Generasi Z. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menyajikan informasi melalui akun resmi Instagram dan TikTok, tingkat kejelasan dan keterpahaman informasi tersebut masih bervariasi di kalangan Generasi Z. Beberapa informan menilai bahwa informasi yang disampaikan sudah cukup jelas dan mudah dipahami, terutama yang disajikan dalam bentuk infografis atau video pendek dengan visual yang menarik.

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa informasi tersebut masih terlalu formal, bertele-tele, atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh kalangan muda. Istilah-istilah teknis atau jargon pemerintahan yang kurang familiar bagi Generasi Z dapat menjadi penghalang dalam memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, panjang konten juga memengaruhi tingkat keterpahaman.

Konten yang terlalu panjang atau padat dengan informasi cenderung kurang diminati dan sulit dicerna oleh Generasi Z, yang umumnya memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Oleh karena itu, penyederhanaan informasi dan penggunaan bahasa yang lebih santai dan komunikatif sangat diperlukan untuk meningkatkan keterpahaman informasi di kalangan Generasi Z. Pemanfaatan fitur-fitur interaktif seperti polling, kuis, atau sesi tanya jawab juga dapat membantu mengukur tingkat keterpahaman informasi dan memberikan kesempatan bagi Generasi Z untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi. Pemerintah Kota Semarang perlu secara berkala mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang digunakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback dari Generasi Z untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan mereka.

c. Perubahan Sikap dan Perilaku di Kalangan Generasi Z terkait keterbukaan Informasi Publik setelah terpapar konten dari akun resmi pemerintah.

Paparan terhadap konten keterbukaan informasi publik melalui akun resmi Pemerintah Kota Semarang di Instagram dan TikTok memberikan

dampak yang bervariasi terhadap sikap dan perilaku Generasi Z. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa paparan konten tersebut meningkatkan kesadaran Generasi Z mengenai isu-isu publik yang relevan dengan Kota Semarang, seperti program pembangunan, kebijakan pemerintah, dan layanan publik yang tersedia. Beberapa informan mengaku bahwa mereka menjadi lebih tertarik untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai isu-isu tersebut setelah melihat konten di media sosial.

Namun, perubahan sikap ini tidak selalu diikuti dengan perubahan perilaku yang signifikan. Meskipun kesadaran mereka meningkat, tidak semua anggota Generasi Z termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan atau memberikan feedback kepada pemerintah. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi bahwa partisipasi mereka tidak akan memberikan dampak yang berarti, serta keterbatasan waktu dan sumber daya.

Meskipun demikian, ada pula beberapa contoh perubahan perilaku positif yang diamati. Beberapa informan mengaku bahwa mereka menjadi lebih aktif mengikuti berita dan informasi terkini mengenai Kota Semarang, serta lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang

mereka terima dari berbagai sumber. Selain itu, ada pula yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang

Memanfaatkan media sosial secara efektif, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan aksesibilitas informasi tetapi juga membangun kepercayaan publik. Kejelasan dan keterpahaman informasi yang disampaikan melalui akun resmi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari misinformasi dan hoax, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Sehingga untuk menjawab Faktor – faktor yang mempengaruhi peran akun media sosial (Instagram dan TikTok) Pemerintah Kota Semarang pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat diamati berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward III.

a. Saluran Komunikasi dengan Platform Media Sosial

Saluran komunikasi melalui platform media sosial memainkan peran penting dalam interaksi antara pemerintah

dan masyarakat, khususnya Generasi Z. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang memungkinkan komunikasi yang lebih langsung dan interaktif. Dalam konteks Pemerintah Kota Semarang, peran akun resmi media sosial (seperti Instagram dan TikTok) sangat penting dalam menjangkau Generasi Z, yang merupakan kelompok usia yang sangat aktif di platform-platform ini.

Efektivitas komunikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keefektifan konten yang disampaikan, pemilihan platform yang tepat, serta desain dan format konten yang menarik. Generasi Z cenderung lebih menyukai konten visual dan interaktif, sehingga penggunaan fitur-fitur seperti video pendek dan polling dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Selain itu, transparansi dan responsivitas pemerintah dalam menjawab pertanyaan atau komentar dari masyarakat juga sangat krusial untuk membangun kepercayaan.

Generasi Z di Kota Semarang menunjukkan bahwa mereka lebih memilih mendapatkan informasi melalui Instagram dan TikTok karena kedua platform tersebut dianggap lebih efektif dan up-to-date dibandingkan dengan membuka website. Mereka dapat dengan mudah menemukan informasi terbaru yang muncul secara otomatis di feed mereka. Keunggulan ini

membuat proses pencarian informasi menjadi lebih praktis dan cepat, tanpa harus mencari secara manual di berbagai situs web. Selain itu, kemampuan untuk menyimpan postingan yang dianggap penting juga menjadi alasan utama, memudahkan mereka untuk mengingat informasi yang telah diperoleh. Informasi yang diberikan melalui akun resmi pemerintah juga dianggap terpercaya.

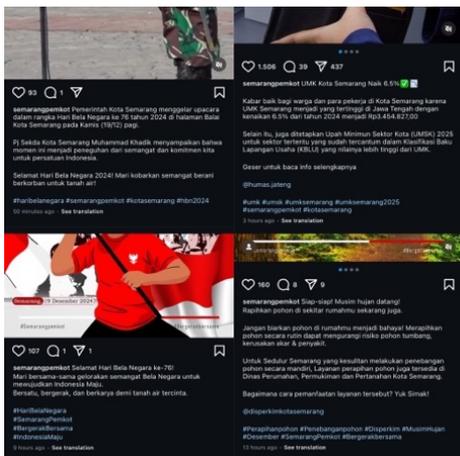
b. Frekuensi dan Konsistensi dalam Mengunggah Konten yang berkaitan dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Konsistensi konten dalam pengelolaan akun resmi media sosial Pemerintah Kota Semarang, terutama di platform seperti Instagram dan TikTok, merujuk pada frekuensi dan ketepatan waktu dalam mengunggah konten yang berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik. Frekuensi yang tinggi dalam mengunggah konten sangat penting untuk menjaga keterlibatan audiens, karena dengan rutin memposting informasi terkini mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, masyarakat dapat tetap terinformasi. Selain itu, kualitas dan relevansi konten juga menjadi aspek krusial; konten harus informatif, menarik, dan sesuai dengan minat Generasi Z, menggunakan berbagai format seperti video pendek atau infografis.

Konsistensi dalam penyampaian informasi ini berkontribusi pada kredibilitas akun resmi pemerintah, di mana masyarakat lebih cenderung mempercayai informasi yang disampaikan secara transparan dan akurat. Interaksi aktif dengan audiens juga merupakan bagian dari konsistensi konten; merespons komentar dan pertanyaan dari masyarakat dapat menciptakan hubungan dua arah yang lebih baik.

Postingan Instagram

@semarangpemkot Pada tanggal 19 juli 2024



Sumber: Instagram @semarangpemkot

Data dari akun @semarangpemkot menunjukkan frekuensi posting yang cukup tinggi, dengan beberapa postingan dalam sehari yang mencakup isu-isu penting seperti kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dan layanan publik lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keterlibatan masyarakat dengan menyediakan informasi terkini secara konsisten.

c. Diversifikasi Konten berkaitan dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Diversifikasi konten dalam konteks akun resmi media sosial Pemerintah Kota Semarang merujuk pada penyajian informasi dalam berbagai format, seperti gambar, video, dan infografis, untuk menarik perhatian Generasi Z yang lebih menyukai konten visual. Dengan mengintegrasikan elemen visual yang beragam, pemerintah dapat menyampaikan pesan mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik dengan cara yang lebih dinamis dan interaktif.

Diversifikasi konten juga membantu pemerintah untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan memenuhi preferensi beragam pengguna media sosial. Dengan menyediakan variasi dalam format konten, instansi pemerintah tidak hanya dapat menarik perhatian Generasi Z, tetapi juga meningkatkan daya tarik emosional dan memperkuat daya ingat audiens terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik, di mana penyampaian informasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Perbandingan Postingan Instagram @semarangpemkot pada tahun 2021 dan 2024



Sumber: Instagram @semarangpemkot

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Semarang melalui akun resmi media sosialnya menunjukkan upaya yang signifikan dalam memanfaatkan platform digital untuk menjangkau Generasi Z. Dengan frekuensi dan konsistensi unggahan, penyajian konten yang menarik dan bervariasi, serta interaksi aktif dengan audiens, pemerintah berupaya membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan.

d. Keterampilan dan Kompetensi Staf Pemerintah yang Mengelola Akun Media Sosial (Sumberdaya Manusia)

Keterampilan dan kompetensi staf pemerintah pengelola akun media sosial sangat krusial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Tim yang kompeten mampu menghasilkan konten menarik, berinteraksi efektif, serta menjaga citra positif pemerintah. Keterampilan penting meliputi kemampuan menulis, komunikasi publik, desain grafis, video editing, dan pengetahuan tren media sosial. Kompetensi mencakup kreativitas, berpikir strategis, problem solving, kerja tim, dan pemahaman mendalam tentang kebijakan keterbukaan informasi. Diskominfo Kota Semarang memiliki tim khusus yang terdiri dari ahli desain, penulis caption, dan editor video yang kompeten di bidangnya. Selain itu dengan menggunakan bahasa yang kekinian informasi yang disampaikan menjadi mudah diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama Generasi Z. Respon cepat dari admin menunjukkan bahwa admin sangat kompeten dalam mengelola akun media sosial dan berinteraksi dengan masyarakat.

e. Pelatihan dan Pengembangan Digital bagi Pegawai yang Terlibat dalam Pengelolaan Media Sosial (Sumber daya Manusia)

Pelatihan dan pengembangan digital bagi pegawai pengelola media sosial sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam memanfaatkan platform digital secara efektif. Proses ini mencakup pelatihan teknis, seperti analisis data dan pembuatan konten, serta pengembangan strategi

komunikasi yang tepat untuk menjangkau audiens secara relevan. Manajemen SDM juga krusial, di mana pegawai dilatih untuk merespons situasi sulit di media sosial dengan profesionalisme, menjaga reputasi institusi.

Diskominfo Kota Semarang menunjukkan bahwa pendekatan otodidak lebih dominan dalam pengembangan keterampilan, dengan pelatihan formal yang jarang diadakan, hanya setahun sekali dan berfokus pada dasar-dasar. Meskipun ada sumber daya seperti programmer yang dapat membuat website dan software, ketergantungan pada inisiatif pribadi untuk belajar menunjukkan kebutuhan akan program pelatihan yang lebih terstruktur. Kondisi ini dapat membuat pegawai merasa kurang mendapatkan dukungan untuk mengasah kemampuan mereka dalam pengelolaan media sosial. Oleh karena itu, terdapat peluang bagi Pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan program pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di media sosial.

f. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga (Sumber daya Manusia)

Diskominfo Kota Semarang telah menyusun program edukasi yang menarik dengan kolaborasi ini, menyampaikan

informasi tentang program pemerintah, seperti kesehatan dan pendidikan, dengan cara yang menarik dan akurat.

Konten yang dihasilkan, termasuk seminar dan kampanye digital, mendidik generasi muda tentang hak mereka dalam mengakses informasi publik dan menggunakan media sosial. Kolaborasi dengan influencer lokal juga membantu menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, kerjasama dengan UMKM untuk konten TikTok memungkinkan promosi produk lokal dan meningkatkan kesadaran Generasi Z.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Diskominfo secara aktif berkolaborasi dengan bidang lain dalam pemerintah, mencerminkan budaya kerja yang positif dan komunikasi yang baik. Kerjasama ini meningkatkan efisiensi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi aktif Generasi Z dalam mendukung program pemerintah dan produk lokal. Secara keseluruhan, kolaborasi ini memperkuat akses informasi dan mendukung implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.

g. Sumber Teknologi

Sumber teknologi sangat penting dalam pemanfaatan media sosial, seperti Instagram dan TikTok, untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi Generasi Z di Kota Semarang.

Media sosial memungkinkan pemerintah menjangkau audiens muda secara interaktif dan efektif.

Diskominfo Kota Semarang menyediakan komputer, laptop, dan aplikasi video editor berbayar untuk meningkatkan kualitas konten. Meskipun pelatihan hanya setahun sekali, tim memiliki alat yang memadai untuk menciptakan materi profesional dan menarik. Ini mencerminkan langkah positif menuju peningkatan profesionalisme dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta ekspektasi audiens.

h. Sumber Anggaran

Sumber anggaran untuk kebijakan keterbukaan informasi di Kota Semarang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo). Diskominfo aktif dalam Rapat Badan Anggaran DPRD untuk membahas kebutuhan anggaran yang mendukung layanan komunikasi dan transformasi digital.

Dalam rapat tersebut, Diskominfo memaparkan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan layanan komunikasi dan informasi publik, termasuk program-program yang mendukung transformasi digital dan penguatan sistem pemerintahan

berbasis elektronik (SPBE) di Kota Semarang.

i. Sikap dan Komitmen Pelaksana Kebijakan

Sikap pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik, berlandaskan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksana yang proaktif cenderung lebih responsif dalam menyampaikan informasi dan menerima masukan dari masyarakat, menciptakan dialog terbuka yang esensial untuk implementasi kebijakan ini.

Penghargaan Komisi Informasi Publik (KIP) Awards 2024



Sumber: ppid.semarangkota.go.id

Diskominfo Kota Semarang menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat dan efisien, serta melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk meningkatkan kualitas layanan. Penghargaan "INFORMATIF" yang diterima Diskominfo menegaskan keberhasilan mereka dalam keterbukaan

informasi. Secara keseluruhan, disposisi positif pelaksana kebijakan berperan penting dalam menciptakan komunikasi efektif dan transparan melalui media sosial, mendukung partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

j. Responsivitas Pemerintah terhadap pertanyaan atau keluhan dari Generasi Z di Media Sosial

Responsivitas pemerintah berkaitan dengan kecepatan dan efektivitas dalam menanggapi pertanyaan atau keluhan masyarakat, terutama Generasi Z, di media sosial. Wawancara menunjukkan sikap ambivalen masyarakat; Informan III merasa pemerintah tidak sepenuhnya responsif, sedangkan Diskominfo Kota Semarang mengungkapkan untuk merespons dengan cepat, meskipun ada keterbatasan dalam menangani banyak komentar.

Meskipun ada usaha untuk menjawab dan menggunakan fitur "pin", interaksi terkadang tidak memuaskan harapan masyarakat. Secara keseluruhan, responsivitas yang ambivalen ini mencerminkan rendahnya disposisi positif pelaksana kebijakan. Untuk memperbaikinya, diperlukan pelatihan dan penguatan budaya kerja yang responsif agar dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

k. Koordinasi Internal

Koordinasi internal dalam birokrasi, menurut Teori George Edward III, penting

untuk memastikan interaksi antar unit pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Dalam konteks keterbukaan informasi publik di Kota Semarang, koordinasi yang baik memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan akurat serta pengelolaan umpan balik dari masyarakat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Diskominfo berfungsi sebagai pedoman sistematis untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, mencakup langkah-langkah dari pengumpulan hingga penyebaran.

Diskominfo Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun anggota tim memiliki tugas berbeda, mereka tetap berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan SOP yang terstruktur dan koordinasi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan keterbukaan informasi, terutama bagi Generasi Z di media sosial. Namun, keberhasilan ini bergantung pada dukungan struktur birokrasi yang baik agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan.

l. Flektabilitas Birokrasi

Fleksibilitas birokrasi, menurut Teori George Edward III, adalah kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Ini penting dalam kebijakan

publik, terutama untuk Generasi Z yang aktif di media sosial.

Tim kreatif di Diskominfo Kota Semarang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan informasi melalui platform seperti Instagram dan TikTok. Informan IV menambahkan bahwa media sosial membantu pemerintah menyampaikan kebijakan dan respons dengan cepat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan struktur tim yang fleksibel, pemerintah dapat lebih responsif terhadap tantangan, memperkuat kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, fleksibilitas birokrasi di Diskominfo Kota Semarang berjalan baik, mendukung keterbukaan informasi publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terpaan media sosial memiliki korelasi yang signifikan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik. Instagram dan TikTok, dengan algoritma yang menyesuaikan konten berdasarkan minat pengguna, memungkinkan informasi terkait keterbukaan publik tersebar luas dalam waktu singkat. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini mengidentifikasi dua aspek utama yang mempengaruhi terpaan media:

frekuensi dan atensi, yang berdampak signifikan pada pemahaman, keterlibatan, dan partisipasi Generasi Z dalam kebijakan keterbukaan informasi publik.

1. Pemanfaatan Media Sosial: Instagram dan TikTok memiliki potensi besar untuk menyampaikan kebijakan dengan konten visual, mempermudah pemahaman hak akses informasi. Namun, meskipun konten menarik seperti video dan sesi interaksi telah digunakan, keterlibatan aktif masih rendah.
2. Hambatan: Meskipun frekuensi penggunaan media sosial tinggi, interaksi aktif tetap rendah, dengan banyak pengguna hanya memberi tanda suka tanpa berkomentar. Ini mencerminkan rendahnya literasi digital dan skeptisisme terhadap pemerintah, serta kekhawatiran akan respons yang kurang memadai terhadap masukan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran media sosial dalam kebijakan keterbukaan informasi publik mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi:

1. Komunikasi dan Struktur Birokrasi: Keduanya berjalan baik, mendukung efektivitas penggunaan media sosial oleh Pemerintah Kota Semarang. Media sosial efektif dalam menyampaikan informasi

dan berinteraksi dengan masyarakat, dengan konten yang beragam dan up-to-date. Prosedur operasional standar (SOP) dan kolaborasi tim yang jelas membantu menyajikan informasi relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Hambatan: Terdapat kendala dalam faktor sumber daya, seperti keterbatasan pelatihan digital bagi staf yang hanya dilakukan setahun sekali, mengakibatkan pegawai bergantung pada inisiatif pribadi. Selain itu, ada sikap ambivalen terhadap responsivitas pemerintah di media sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, berperan signifikan dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, terutama untuk Generasi Z. Dengan memanfaatkan media sosial secara optimal, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat, menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

Saran

Keberhasilan peran media sosial (Instagram dan TikTok) dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang dipengaruhi oleh dimensi komunikasi yang efektif, sumber daya

manusia yang terampil, disposisi kritis masyarakat, dan struktur birokrasi yang fleksibel. Namun, keterlibatan dan partisipasi aktif Generasi Z masih rendah karena skeptisisme terhadap pemerintah; mereka cenderung menjadi penonton tanpa berkomentar atau berdialog. Saran untuk Diskominfo Kota Semarang meliputi:

1. Analisis Data: Melakukan analisis penggunaan media sosial oleh Generasi Z untuk memahami pola konsumsi informasi, guna merancang strategi komunikasi yang lebih efektif.
2. Kolaborasi dengan Influencer: Bekerja sama dengan influencer untuk menyebarkan informasi kebijakan publik dengan cara menarik, serta mengembangkan konten interaktif di media sosial.
3. Pendidikan Literasi Digital: Memprioritaskan program literasi digital untuk membantu Generasi Z memahami dan mengevaluasi informasi secara kritis, sehingga mereka menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak.
4. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan media sosial untuk memastikan efektivitas strategi komunikasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran media sosial dapat

dimaksimalkan untuk meningkatkan keterlibatan Generasi Z dalam proses demokratisasi dan pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka.

Daftar Pustaka

Andriany, S., & Ariyanti, A. (2023).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PALEMBANG. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(1), 35-52.

Ardi, D. F. I., Santoso, D., & Nursanty, N.

(2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Center) Diskominfo Kota Bengkulu. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP)*, 1(1), 41-55.

Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi)*.

FATIMAH, M. N. (2020). FUNGSI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AKUN RESMI INSTAGRAM@bkngoidofficial (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).

Fitriani, A. (2023). Keterbukaan Informasi Publik. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1).

Giffari, M. F., Wiyati, E. K., Andriani, F., & Putri, C. E. (2024). Peran Humas Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada PPID Kemendikbudristek. *Jurnal Cyber PR*, 4(2), 119-131.

Hayat, M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(01), 104-114.

INDONESIA, U. U. R. (2008).

Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang (UU), (14).

Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197.

Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).

- Nawang Sari, E. R., & Sari, W. K. (2019). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 86-95.
- PALEMBANG. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(1), 35-52.
- Permatasari, A., & Marsa, M. A. (2022). DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM QUARTER LIFE CRISIS GEN Z DI INDONESIA. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- PREWITASARI, K. (2022). Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Tentang Pelayanan Informasi Publik Sebagai Implementasi Uu Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Jenderal Soedirman) (Doctoral dissertation, Univeraitas Jenderal Soedirman).
- Pujiono, A. (2021). Media sosial sebagai media pembelajaran bagi generasi Z. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 1-19.
- Putra, A. M. H. (2024). Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pemanfaatan Media Sosial di Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Rahayu, D. A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KOMUNIKASI PUBLIK MEDIA SOSIAL PADA KAUM MILENIAL DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(1), 52-57.
- Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., ... & Bachtera, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024: Pendekatan Kuantitatif. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1255-1264.
- Suhendra, S., Suprianto, B., & Marhamah, F. S. (2024). Mengurai Potensi Media Sosial dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 157-168.